



Menolak itu Harus Jelas

■ Dinkes Pertanyakan Alasan Penolakan Imunisasi

POLEMIK VAKSIN

- Kanwil Kemenag DIY menyatakan ada delapan sekolah yang menolak imunisasi MR dari pemerintah
- Dinkes Kota Yogyakarta menyatakan akan melakukan koordinasi jika memang sekolah-sekolah itu akan menolak vaksinasi
- Dinkes akan menggandeng pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag Kota Yogyakarta untuk pendekatan kepada sekolah
- Anak yang tidak mendapat vaksinasi ini akan rentan terkena campak
- Gubernur DIY juga berharap semua pihak bisa berkomunikasi kepada pihak-pihak yang menolak imunisasi

- Pada 29 Juli 2013, MUI DIY mengeluarkan Rekomendasi Dewan Pimpinan MUI DIY No B-236/MUI-DIY/VII/2013 tentang penyelenggaraan Program Imunisasi pada Bayi, Balita, dan Anak Sekolah Dasar/Sederajat. Ada tiga poin di dalamnya
 - Pertama, tidak ada yang perlu dipermasalahkan terhadap penggunaan vaksin program pemerintah dalam pelaksanaan imunisasi rutin pada bayi dan balita
 - Kedua, tidak ada yang perlu dipermasalahkan terhadap penggunaan vaksin program pemerintah dalam pelaksanaan imunisasi rutin pada anak Sekolah Dasar/Sederajat melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah
 - Ketiga, MUI DIY mendukung pemerintah dalam menyelenggarakan program imunisasi rutin baik pada bayi, balita, maupun anak Sekolah Dasar/Sederajat

YOGYA, TRIBUN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta meminta kejelasan pihak sekolah yang menolak mengikuti program imunisasi MR (*Measles/campak dan Rubella*) massal mulai Agustus mendatang. Anak yang tidak divaksin dimungkinkan dapat menyebar-

kan penyakit.

Kepala Dinkes Kota Yogyakarta, Fita Yulia Kisworini mengatakan, akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag Kota Yogyakarta.

● ke halaman 14

GRAFIS/FAUZIRAKIMAN

Menolak itu Harus Jelas

● Sambungan Hal 13

Koordinasi itu sebagai upaya sosialisasi kepada pihak sekolah tentang program imunisasi untuk mencegah campak dan Rubella. "Menolak itu harus ada kejelasannya. Ini kan vaksin dari pemerintah, ya harus dijalankan," ujar Fita, Kamis (27/7).

Ia menyebut, bila sekolah-sekolah tersebut tetap menolak, maka Pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan pendekatan secara langsung ke pihak terkait. Jika dipertukan, Dinkes akan menggandeng instansi lain untuk melakukan pendekatan.

"Kita tidak mungkin berjalan sendiri, mungkin kita akan menggandeng Dinas Pendidikan," jelasnya.

Fita menegaskan, bila ada anak yang tidak mendapat imunisasi maka ia akan rentan terkena campak. Ketika anak tersebut sudah terkena campak, maka ia bisa menebarkan atau menularkan penyakit tersebut ke anak-anak lainnya.

"Itu kan namanya menzoli-

mi orang lain, karena merugikan yang lain karenanya imunisasi harus tetap dilakukan karena mengutamakan kesehatan bersama," tegasnya.

Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Sigit Warsita mengaku belum mendapat laporan terkait adanya sekolah di Kota Yogyakarta yang menolak mengikuti program imunisasi MR Agustus mendatang.

Namun ia berharap imunisasi tetap bisa dijalankan. "Ya kalau ini menyangkut kesehatan bagi generasi muda, tentu untuk bisa diikuti," ungkapnya.

Ia mengatakan, selama hasil penelitian dan temuan dari sisi syari atau aturan agama Islam, maka pihaknya akan mendukung program vaksinasi. Ia berharap pihak dinas kesehatan mampu menjelaskan tentang bahan-bahan tersebut bilamana memang tidak mengandung bahan yang tidak halal. "Kami berharap, segala sesuatu yang dari itu (imunisasi) dipastikan halal secara syari atau menurut Islam. Pada dasarnya mereka menolak karena berkeyakinan ada yang secara syari tidak diperbolehkan," jelasnya.

Komunikasi

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta agar Dinas Kesehatan dan juga instansi terkait untuk melakukan komunikasi yang baik kepada pihak-pihak yang menolak dilakukan imunisasi. Hal ini menyusul beredarnya kabar delapan sekolah di DIY yang menolak siswa-siswinya diimunisasi oleh petugas kesehatan.

"Mungkin belum pas saja. Saya harapkan semua bisa melakukan imunisasi. Ya biar Dinkes (Dinas Kesehatan) diberi ruang dulu," ujarnya saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kamis (27/7).

Terkait alasan menolak imunisasi dikarenakan meragukan kandungan vaksin yang halal atau haram, menurut Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tersebut, hal itu juga bisa dibicarakan dengan baik-baik.

"Tinggal ditanya to, ada *ndak*. Kalau jawabannya ada (kandungan haram), ya enggak (menolak). Kalau jawabannya tidak ada, ya bagaimana tetep imunisasi. Kan gampang to. Kalau hanya seperti itu kan bisa," bebarnya.

Terkait kandungan dari vaksin yang digunakan untuk

program imunisasi pada bayi, batita, dan anak sekolah dasar dan sederajat telah dijamin oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada 29 Juli 2013, MUI DIY mengeluarkan Rekomendasi Dewan Pimpinan MUI DIY No B-236/MUI-DIY/VII/2013 tentang penyelenggaraan Program Imunisasi pada Bayi, Batita, dan Anak Sekolah Dasar/Sederajat. Terdapat tiga rekomendasi di dalamnya.

Pertama, tidak ada yang perlu dipermasalahkan terhadap penggunaan vaksin program pemerintah dalam pelaksanaan imunisasi rutin pada bayi dan batita. Kedua, tidak ada yang perlu dipermasalahkan terhadap penggunaan vaksin program pemerintah dalam pelaksanaan imunisasi rutin pada anak Sekolah Dasar/Sederajat melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).

Ketiga, MUI DIY mendukung pemerintah dalam menyelenggarakan program imunisasi rutin baik pada bayi, batita, maupun anak Sekolah Dasar/Sederajat agar terlindung dari penyakit TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, hepatitis B, Pneumoni, Meningitis, Polio, dan Campak. (gll/kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005